

KOORDINASI SISTEM RESPONSE TIME MUSIBAH PELAYARAN DI KANTOR SEARCH AND RESCUE (SAR) PONTIANAK

Novi Pristian Wulandari, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Email: wulandarinv105@yahoo.com

Abstrak

Kata kunci: Response Time, Koordinasi Internal Vertikal, Koordinasi Internal Horizontal, dan Kendala Penanganan Musibah.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana koordinasi internal yang dilakukan secara vertikal dan horizontal di Kantor penanganan musibah Pontianak dalam pelaksanaan *response time* musibah pelayaran di Provinsi Kalimantan Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan musibah pelayaran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang memfokuskan pada variabel koordinasi internal secara vertikal dan koordinasi internal secara horizontal. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran pada Kantor penanganan musibah Pontianak dilaksanakan secara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Sistem koordinasi internal selama ini telah dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dan terus berupaya melakukan koordinasi eksternal dengan pihak-pihak potensi seperti instansi daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah musibah yang belum tertangani maka perlunya penambahan dalam fasilitas utama dan pendukung untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di laut agar meningkatnya jumlah musibah yang tertangani dan jumlah korban yang dapat terselamatkan.

Abstract

Keywords: Response Time, Internal Coordination Vertical, Horizontal Internal Coordination and Disaster Handling Constraints.

The writing of this article aims to illustrate how internal coordination is done vertically and horizontally in the Office of Pontianak in the implementation of disaster management response time cruise disaster in West Kalimantan and constraints faced in handling shipping disaster. This study included in the descriptive study with qualitative analysis, which focuses on internal coordination variable vertical and horizontal internal coordination. The results of the field study showed that internal coordination within the system response time cruise disaster on disaster management office Pontianak implemented vertical relationships and horizontal relationships. Internal coordination system had been implemented optimally and in accordance with the rules and procedures have been established and continue to coordinate with external parties such as the potential of regional institutions, private and public. To anticipate an increase in the number of disasters that have not been handled in the need for additional primary facilities and support for the implementation of search and rescue operations at sea in order to increase the number of calamity that handled and the number of victims could be saved.

A. PENDAHULUAN

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan sangat dituntut dalam peranannya dalam roda pembangunan negara. Pada dasarnya fungsi dari sistem transportasi beserta sarana dan fasilitasnya adalah sebagai elemen yang menghubungkan titik-titik yang terpisah di dalam ruang dengan berbagai mekanisme yang terdapat di dalamnya. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu

Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari.

Meningkatnya frekuensi pelayaran (baik angkutan barang maupun penumpang) menimbulkan semakin tingginya kerawanan musibah yang mungkin terjadi. Sebagai bagian dari komunitas internasional dan untuk memajukan sektor perekonomian negara, Indonesia masuk menjadi anggota *International Maritime Organisation* (IMO) pada tahun 1966

dan anggota *International Civil Assosiation Organisation* (ICAO) pada tahun 1950. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus meningkatkan eksistensi komunitas transportasi internasional dengan meningkatkan pelayanan jasa *Search And Rescue* (SAR) melalui peningkatan Response Time penanganan musibah/bencana. Untuk itu, eksistensi Institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencarian dan pertolongan serta terus meningkatkan kesiap-siagaan petugas pencari dan penolong akan mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.

Operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan secara baik dapat memberikan publisitas yang positif tentang situasi yang sebaliknya mungkin akan dipandang secara negatif. Ketika sistem SAR untuk pertama kalinya menyadari adanya suatu keadaan darurat nyata atau potensial, keterangan yang dikumpulkan dan tindakan awal yang diambil sering bersifat kritis bagi keberhasilan operasi-operasi SAR. Harus diasumsikan bahwa pada setiap insiden ada korban selamat yang akan memerlukan bantuan dan kemungkinan selamat akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Keterangan harus dikumpulkan dan dievaluasi untuk menentukan sifat distress, fase darurat yang tepat, dan tindakan apa yang harus diambil.

Penerimaan keterangan yang cepat penting untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh untuk pengambilan keputusan segera mengenai serangkaian tindakan terbaik, dan pengaktifan fasilitas SAR tepat waktu sehingga dimungkinkan untuk menemukan, mendukung dan menyelamatkan orang-orang yang mengalami distress/emergency dalam waktu sesingkat mungkin. Response terhadap insiden pencarian dan pertolongan biasanya dilakukan melalui proses lima tahap yang berurutan. Tahap-tahap ini adalah kelompok aktivitas yang secara khusus dilakukan oleh sistem SAR dalam menanggapi insiden sejak sistem SAR mengetahui adanya insiden tersebut sampai penanggulangan peristiwa tersebut diselesaikan.

Kelima tahap dalam upaya pencarian dan pertolongan adalah Kesadaran, Tindakan awal, Perencanaan, Pelaksanaan Operasi SAR, dan Penutupan Operasi SAR. Dimana kelima tahap ini terbagi menjadi dua yaitu Response Time (Kesadaran dan Tindakan Awal), dan Operasi SAR (Perencanaan, Pelaksanaan Operasi, dan Penutupan Operasi).

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung oleh keberhasilannya dari pada individu organisasi itu sendiri dengan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi antara sesama pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Berbagai macam

hambatan pasti akan ditemui oleh para individu organisasi untuk bisa bekerja dengan baik sehingga kinerja mereka dapat diterima dengan baik oleh perusahaan dan masyarakat yang memerlukan. Bagi organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, salah satunya adalah Kantor SAR tentu saja dapat dilihat dari bagaimana organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada publik terhadap pencapaian response time yang cepat dan tepat, karena kunci dari penyelamatan adalah response time.

Frekuensi musibah pelayaran terlihat perubahan peningkatan jumlah musibah pelayaran yang signifikan pada setiap tahunnya dan dilihat juga masih ada beberapa jumlah musibah yang belum tertangani pada Kantor SAR Pontianak. Maka dari itu perlu adanya peningkatan dalam pencapaian koordinasi khususnya pada sistem tindakan awal (*response time*) agar dapat meminimalisir jumlah korban musibah pelayaran yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.

Dari fenomena permasalahan yang terjadi mengenai beberapa musibah pelayaran yang belum ditangani, maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang koordinasi dalam sistem response time musibah pelayaran di wilayah Kalimantan Barat dan memfokuskan pada koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran. Adapun rumusan permasalahan adalah bagaimana koordinasi internal yang dilakukan Kantor SAR Pontianak sejauh ini dalam pelaksanaan response time musibah pelayaran di wilayah Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana koordinasi internal secara vertikal dan horizontal yang dilakukan pada Kantor SAR Pontianak dalam pelaksanaan response time musibah pelayaran di wilayah Kalimantan Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan musibah pelayaran. Manfaat penelitian ini yaitu; secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi khususnya kajian manajemen publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana kebijakan publik, khususnya kepada koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran di Kantor SAR Pontianak Provinsi Kalimantan Barat maupun daerah lainnya.

B. KAJIAN LITERATUR

Menurut Pasolong (2011;84-86) ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yang bersifat universal atau biasa disingkat dengan POSDCORB, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Planning*/perencanaan; suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu dimasa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. *Organizing*/organisasi; suatu proses pembagian kerja yang disertai dengan pendelegasian wewenang.
3. *Staffing*; suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi.
4. *Directing*/pengarahan; suatu tugas yang kontinu dalam pembuatan keputusan dan penyusunannya dalam aturan-aturan dan instruksi-instruksi khusus atau umum, dan melayani sebagai pemimpin organisasi.
5. *Coordinating*/koordinasi; suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target/tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar mencapai tujuan secara efisien.
6. *Reporting*/pelaporan; yaitu kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjadi agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian dan inspeksi.
7. *Budgeting*/anggaran; yaitu semua kegiatan dalam bentuk perencanaan, perhitungan dan pengendalian anggaran.

Koordinasi disamping sebagai suatu asas umum organisasi yang harus ada dan harus dilaksanakan dalam setiap organisasi, koordinasi juga merupakan salah satu fungsi manajemen.

Beberapa definisi koordinasi antara lain yaitu menurut Soemodiharjo (2001:136), berasal dari kata "*Cum*" yang berarti berbeda-beda dan "*Ordinare*" yang berarti penyusunan dan penempatan sesuatu menurut keharusannya.

Kemudian menurut D. White (dalam Syaifiie, 2006:85), Koordinasi sebagai penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*part in time*), sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak dalam keseluruhan hasil.

Sementara da Silva dan Agusti-Cullell menyatakan koordinasi adalah coordination konsep dari keyakinan dari suatu organisasi, bersama-sama dengan konsep sebuah perusahaan dan institusi, dan Brech (dalam Hasibuan, 2011:85), Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Novi Pristian Wulandari

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Koordinasi Operasional SAR meliputi koordinasi pemberitaan, perencanaan operasi, penyiagaan, pengerahan, pengendalian, dan evaluasi operasi termasuk dukungannya serta hal-hal yang berkaitan dengan lintas batas (BASARNAS, 1996:24).

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat dilihat bahwa kegiatan koordinasi kesemuanya menitikberatkan pada kegiatan hubungan manusia dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Demikian pula bila dilihat dari pengertian koordinasi tersebut kesemuanya dimaksudkan untuk mensekresikan dan menyatukan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pimpinan dan kelompok pegawai pelaksana untuk saling berkoordinasi sehingga hasil yang dicapai dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat.

Dua jenis koordinasi menurut Handyaningrat (2003:74), yaitu :

1. Koordinasi Internal.
 - a. Koordinasi internal yang bersifat vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis.
 - b. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang bersifat fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya.
 - c. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (*line of command*).
2. Koordinasi eksternal.
 - a. Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktorat bina program, direktorat jenderal transmigrasi terhadap kepala direktorat penyiapan tanah pemukiman transmigrasi, direktorat jenderal bina marga.
 - b. Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala badan administrasi kepegawaian Negara (BAKN) terhadap para kepala biro kepegawaian tiap-tiap departemen.

Koordinasi horizontal (fungsional) merupakan koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan azas fungsional, (Allen,2011).

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (1992:74), menjelaskan bahwa ada beberapa indikator/alat pada sistem hubungan vertikal dan horizontal dalam suatu organisasi, yaitu:

1. Alat untuk melakukan hubungan vertikal.
 - a. *Hierarki*;
Hubungan vertikal ini dilakukan melalui saluran hubungan perintah maupun pelaporan yang telah dirancang dalam tingkatan hierarki.
 - b. *Peraturan dan Prosedur*;
Alat ini digunakan jika dalam organisasi sering muncul permasalahan dan keputusan secara berulang-ulang; peraturan dan prosedur membuat tugas-tugas menjadi baku, sehingga mengurangi kebutuhan akan informasi sepanjang hierarki.
 - c. *Rencana dan Jadwal*;
Dengan adanya rencana dan jadwal yang rinci, tingkatan hierarki yang rendah melaksanakan kegiatan tanpa konsultasi atau nunggu perintah dari atasan, dengan syarat bahwa seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan jadwal.
 - d. *Tambahan Tingkat/Posisi pada Hierarki*;
Perusahaan yang sedang tumbuh atau ketidakpastian yang tinggi sering diperlukan tambahan alat hubungan vertikal dengan menambahkan posisi pada hierarki.
 - e. *Sistem Informasi Vertikal*;
Dengan alat ini pengolahan informasi sepanjang hierarki bertambah efisien.
2. Alat untuk melakukan hubungan horizontal.
 - a. *Dokumen Tertulis*;
Pertukaran dokumen tertulis mengenai permasalahan atau keputusan antara beberapa bagian dalam organisasi.
 - b. *Kontak Langsung*;
Alat ini digunakan dengan cara para pimpinan bagian-bagian yang ada keterkaitan atau terlibat pada suatu permasalahan bertemu untuk mencari solusinya.
 - b. *Penghubung*;
Penghubung (*liaison*) adalah seseorang yang berada pada satu bagian organisasi dengan tugas khusus, yaitu melakukan koordinasi kegiatan antara dua bagian organisasi saja.
 - c. *Satuan Tugas*;
Satuan tugas adalah suatu komite yang bersifat sementara yang beranggotakan wakil dari berbagai bagian yang terlibat dalam suatu permasalahan.
 - d. *Tim*;
Tim merupakan satuan tugas yang bersifat permanen yang digunakan bila koordinasi

antar bagian diperlukan secara terus menerus.

d. *Integrator Permanen*;

Integrator permanen dapat berupa suatu jabatan ataupun bagian yang secara khusus bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan beberapa bagian organisasi.

Berdasarkan beberapa uraian diatas bahwa, sistem hubungan dalam organisasi adalah mekanisme untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan integrasi kegiatan antara karyawan, antara satuan-satuan organisasi, serta antara berbagai tingkatan hierarki yang ada dalam organisasi. Hubungan adalah tingkatan koordinasi antar elemen organisasi baik secara vertikal atau horizontal. Hubungan vertikal diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran sedangkan hubungan horizontal diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan individu dalam penanganan musibah pelayaran.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi tentang koordinasi internal pada sistem response time musibah pelayaran di Kantor SAR Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan metode ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan dari permasalahan yang diteliti.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Penelitian ini memiliki subjek penelitian sebagai landasan untuk mendapatkan informasi-informasi saat meneliti, yaitu sebagai berikut: a) Kepala Kantor SAR Pontianak, b) Kepala Sub Seksi SAR Pontianak, c) Kepala Sub Seksi Bina Potensi SAR Pontianak, dan d) Petugas Operator Radio.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a). Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam (*depth interview*) kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan orang-orang ini telah ditentukan sebelumnya. b). Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui tindakan mencatat dokumen atau data tertulis berupa arsip yang dimiliki Kantor SAR Pontianak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. c). Observasi, yaitu

merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dan dilapangan dimana akan dilakukan penelitian.

Prosedur analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif ini adalah Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Adapun proses analisisnya dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Meringkas (*reduksi*); dalam penelitian ini penulis membuat catatan penting dan menganalisis dari data-data hasil wawancara dengan informan tentang indikator-indikator mengenai hierarki, peraturan dan prosedur, rencana dan jadwal, penambahan tingkat posisi pada hierarki, sistem informasi vertikal, dokumen tertulis, kontak langsung, penghubung, satuan tugas, tim, dan integrasi permanen dalam sistem response time musibah pelayaran serta kendala dalam penanganan musibah pelayaran.
2. Memaparkan (*display*); menyajikan dan memaparkan semua data dan informasi yang telah disusun dan dianalisis sesuai dengan hasil wawancara mengenai indikator-indikator koordinasi internal vertikal, koordinasi internal horizontal, dan kendala-kendala dalam penanganan musibah pelayaran dalam bentuk catatan dan tulisan.
3. Penyimpulan (*verifikasi*); yaitu membuat kesimpulan yang paling relevan dari indikator-indikator yang telah dianalisis sehingga dari kesimpulan tersebut akan diperoleh gambaran tentang koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran di Kantor SAR Pontianak.

D. KOORDINASI INTERNAL SISTEM RESPONSE TIME MUSIBAH PELAYARAN PADA KANTOR SAR PONTIANAK.

1. Koordinasi Internal Dalam Hubungan Vertikal (Struktural).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Operasi SAR, menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan koordinasi internal, dimana setiap informasi awal/berita awal pelaporan musibah yang diterima oleh petugas operator radio harus secara langsung dilaporkan/di informasikan ke Kepala Sub Seksi Operasi SAR atau pimpinan tertinggi yang berada ditempat kemudian diteruskan ke Kepala Sub Seksi Potensi dan Kepala Kantor.”

Dalam penyelenggaraan operasi SAR digunakan suatu sistem yang terdiri dari lima

Novi Pristian Wulandari

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

tahapan, salah satunya adalah tahap perencanaan, pada tahapan perencanaan dilakukan setelah tahapan tindakan awal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor SAR, membenarkan dengan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa:

“setiap berita yang diterima dari si pelapor, petugas operator radio harus dengan cermat dan teliti kebenarannya, jangan sampai informasi yang diterima adalah tidak benar adanya karena akan mempengaruhi untuk melanjutkan kedalam tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan operasi SAR.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Potensi, menyatakan bahwa:

“Dalam penyiapan guna penyiagaan fasilitas SAR disesuaikan dengan tingkat resiko, faktor kesulitan lokasi (medan), faktor keadaan korban, faktor cuaca dan keadaan laut di lokasi terjadinya musibah agar dapat mempertimbangkan keputusan dan tindakan apa yang akan diambil, karena di dalam pelaksanaan operasi SAR seorang rescuer (penyelamat) harus memperhatikan dan mengutamakan “*safety first*” yaitu keselamatan diri yang paling penting dan utama.”

Kepala Kantor SAR Pontianak juga menyatakan bahwa:

“Pada saat laporan awal diterima dari petugas operator radio, dugaan terjadinya musibah tersebut secara langsung diteruskan ke Kepala Sub Seksi Operasi dan Ke Kepala Sub Seksi Potensi serta melakukan *briefing* awal untuk penyiapan unsur dan penyiagaan fasilitas SAR.”

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan petugas operator radio, mengatakan bahwa:

“dalam koordinasi awal dilakukan dari petugas operator radio kepada Kepala Sub Seksi Operasi SAR dan kemudian data yang diterima diolah dan dianalisis secara mendalam, karena jika data tersebut diragukan kebenarannya maka akan menyulitkan dalam evaluasi dan memakan waktu dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.”

Bagi Kantor SAR Pontianak, informasi merupakan Bagi Kantor SAR Pontianak, informasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena informasi tersebut diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan penerapan sistem kerja yang baik dan optimal dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang

berkualitas kepada pihak yang terkait akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan, tindakan, dan strategi.

2. Koordinasi Internal Dalam Hubungan Horizontal (Fungsional).

Dalam setiap keadaan darurat tindakan dapat segera diambil setelah diketahui jenis musibah dan lokasi kejadiannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Operasi SAR, mengatakan bahwa:

“Yang menangani secara langsung dalam penerimaan pelaporan awal musibah pelayaran dan mencatat semua data yang disampaikan oleh si pelapor adalah bagian operator radio. Pencatatan data kejadian harus dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditentukan secara sistematis. Setiap petugas pencatat data harus mendahulukan pengumpulan utama (yang terpenting) sehingga bila karena sesuatu sebab komunikasi terputus, proses penanganan musibah tetap dapat berlangsung.”

Dalam hal ini petugas operator radio juga berfungsi sebagai penghubung informasi dan integrator permanen dalam setiap kegiatan SAR. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas operator radio, menyatakan bahwa:

“Data utama atau data-data yang terpenting dalam pengumpulan data tertulis yaitu:

1. Nama pelapor, alamat, dan nomor telepon.
2. Data lengkap kapal, nama kapal, nama panggilan (Call Sign), jumlah penumpang (POB), dan tanda-tanda lain.
3. Tanggal waktu kejadian.
4. Lokasi Kejadian (jarak dari lokasi yang dikenal atau posisi akhir yang diketahui/posisi yang akan dituju berikutnya).

Jenis musibah (terbakar, tabrakan, tenggelam, kebocoran, *medivac*, kandas, mati mesin, *trouble engine*, dan lain-lain).”

Kepala Sub Seksi Potensi SAR juga menyatakan bahwa:

“Setelah diketahuinya adanya dugaan terjadinya musibah, maka secara langsung di koordinasikan kepada petugas dilapangan (*rescue team*) untuk melakukan persiapan dan penyiagaan fasilitas SAR yang akan digunakan, sehingga jika dugaan tersebut benar maka semua unsur dilapangan telah siap untuk melaksanakan operasi SAR.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor SAR Pontianak, mengatakan bahwa:

“Pada Kantor SAR Pontianak terdapat satuan tugas yang bersifat sementara jika mulai diketahui adanya musibah yang terjadi dan satuan tugas tersebut akan segera dibubarkan setelah operasi pencarian dan pertolongan tersebut dapat diselesaikan. satuan tugas atau yang disebut sistem SAR tersebut berbentuk struktur organisasi dengan tingkatan koordinasi yang terkait. Satuan tugas ini pembentukannya pada waktu sistem response time yaitu tahapan tindakan awal tetapi satuan tugas ini difungsikan jika operasi SAR mulai dilaksanakan. Satuan tugas tersebut adalah koordinator SAR (SC), Koordinator Misi SAR (SMC), Koordinator Lokasi Musibah (OSC), dan Unit SAR (SRU). Untuk satuan tugas Koordinator Misi SAR (SMC) dibantu oleh beberapa staff, yang terdiri dari Staff Operasi, Staff Administrasi dan Logistik, Staff Komunikasi, Staff Intelejen, dan Staff Humas, yang mana setiap bagian staff di isi oleh beberapa bagian jabatan struktural.”

3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Kantor Search And Rescue (SAR) Pontianak Dalam Penanganan Musibah Pelayaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu Kepala Sub Seksi Operasi SAR menyatakan bahwa:

“selama ini pelaksanaan pada sistem response time sudah terus berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menanggapi atau meresponse dengan cepat sehingga dari tahun ke tahunnya mengalami kemajuan/peningkatan. Sistem koordinasi internal juga sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang di telah tetapkan dari Kantor Pusat. Namun dengan ini Kantor SAR Pontianak masih mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan operasi SAR Musibah Pelayaran.”

Mengingat luasnya wilayah kerja dan tanggungjawab Kantor SAR Pontianak yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Barat ini sehingga beberapa musibah pelayaran yang belum bisa tertangani secara optimal dengan melihat beberapa hal terutama yaitu sarana laut dan udara yang saat ini dimiliki. Ada beberapa faktor utama yang menjadi keraguan dalam penanganan musibah pelayaran yang terjadi selama ini, yaitu karena:

1. Faktor Keadaan Cuaca;

2. Faktor Keadaan Laut dan Lokasi Musibah, dan;
3. Faktor Sarana Utama/Fasilitas Utama.

Kemudian ditambahkan lagi keterangan dari Kepala Sub Seksi Bina Potensi SAR menyatakan bahwa:

“Dari segi sarana utama atau fasilitas utama yang dimiliki Kantor SAR Pontianak sampai dengan saat ini adalah masih sangat terbatas sekali dalam penanganan musibah pelayaran. Sarana yang dimiliki terkadang belum mampu untuk mencakup beberapa bagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi tanggung jawab kerja Kantor SAR Pontianak.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas operator radio, mengatakan bahwa:

“Selama ini dalam menangani terjadinya musibah pelayaran, kendala yang dihadapi adalah hubungan komunikasi antara petugas operator radio dengan petugas yang ada dilapangan. Terkadang faktor lokasi dan kesulitan lokasi yang terlalu luas sehingga membuat komunikasi sulit di jangkau.”

Kepala Kantor SAR Pontianak, menyatakan bahwa:

“Adapun upaya-upaya yang terus dilakukan hingga sekarang ini, salah satunya adalah melakukan koordinasi secara eksternal yaitu dengan menjalin kerjasama dan membina potensi-potensi SAR dari instansi-instansi Pemerintah Daerah dan swasta, serta organisasi-organisasi masyarakat berpotensi dalam tehnik SAR. Dukungan-dukungan masih terus dilakukan dari pihak eksternal secara optimal dan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki.”

Kegiatan SAR adalah upaya penyelamatan jiwa manusia. Kesuksesan berarti keberhasilan memberikan bantuan dan meminimalkan jumlah korban. Dengan demikian suatu operasi SAR dinilai berhasil apabila dipenuhi persyaratan, yaitu cepat menanggapi (*response time*) informasi musibah yang diterima, tepat menentukan lokasi musibah dan segera mengambil langkah bantuan, serta berhasil memberikan bantuan dan meminimalkan jumlah korban.

E. PENUTUP

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran pada Kantor SAR Pontianak, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Novi Pristian Wulandari

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Di dalam sistem response time musibah pelayaran diklasifikasi kedalam dua tahap yaitu tahap menyadari dan tahap tindakan awal, dimana pada tahapan *response time* ini dari berita awal ataupun pelaporan awal kejadian musibah, penyiapan unsur-unsur, penyiagaan fasilitas operasi SAR, hingga tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan operasi SAR.

Koordinasi internal dalam sistem response time musibah pelayaran pada Kantor SAR Pontianak dilaksanakan secara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Sistem koordinasi internal selama ini telah dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari hierarki, pelaporan awal kejadian musibah pertama kali diterima oleh petugas siaga operator radio dan kemudian diinformasikan ke Kepala Sub Seksi Operasi SAR dan diteruskan ke Kepala Kantor, Kepala Sub Seksi Bina Potensi, dan tim petugas lapangan (rescuer dan awak kapal) dengan secara vertikal.

Pada tahapan tindakan awal dilakukannya pembentukan struktur operasi SAR yang disebut dengan satuan tugas pelaksanaan operasi SAR dengan pelaksanaan koordinasinya dilakukan secara internal yang bersifat hubungan horizontal.

Kendala-kendala yang dihadapi Kantor SAR Pontianak hingga sekarang adalah keadaan cuaca, lokasi musibah (keadaan laut) serta minimnya fasilitas utama untuk pelaksanaan operasi SAR karena daerah jangkauan yang begitu luas yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya-upaya yang dilakukan Kantor SAR Pontianak sejauh ini adalah melakukan koordinasi eksternal dengan pihak-pihak potensi SAR seperti instansi Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat.

F. REFERENSI

BASARNAS. 1996. *SAR Tugas Kemanusiaan*. Jakarta.

Correa da Silva, Flavio Soares & Jaume Agusti-Cullell. 2003. *Knowledge Coordination*. England: John Wiley & Sons Ltd.

Hasibuan, Malayu. S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Handayani, Soewarno. 2003. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Hasibuan, Malayu. S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Soemodiharjo, Soejono. 2001. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Allen, Ncuz. *Koordinasi Dalam Organisasi*,
Diambil dari
<http://ncuzallen.blogspot/2011/11/Koordinasi-dalam-organisasi.html>,
pada Tanggal 12 Maret 2013.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NOVI PRISTIAN WULANDARI
 NIM / Periode lulus : E 2111111
 Fakultas/Jurusan : ISIPOL / IAN
 E-mail address/HP : wulandarinv105@yahoo.com / 081 345 173 174

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

KOORDINASI SISTEM RESPONSE TIME MUSIBAH PELAYARAN
 Di KANTOR SEARCH AND RESCUE (SAR) PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

NIP.

Dibuat di :
 Pada tanggal:

(NOVI PRISTIAN WULANDARI)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociadev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).